



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2014 - 2015**

SENIN, 12 JANUARI 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2015**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2014-2015**

SENIN, 12 JANUARI 2015

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,*

Yang kami hormati:

- Para Wakil Ketua DPR;**
- Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPR; dan**
- Para Anggota DPR.**

Alhamdulillahirobil'alamin, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita bersama-

sama dapat hadir pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014–2015. Sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI pada tanggal 2 Desember 2014, Masa Sidang II ini, rencananya akan berlangsung selama 28 hari kerja dimulai hari ini, tanggal 12 Januari hingga tanggal 18 Februari 2015.

Berdasarkan amanat Pasal 225, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, maka Rapat Paripurna Pembukaan ini menyampaikan rencana kegiatan DPR yang akan dilaksanakan pada Masa Sidang II, dan masalah-masalah lain yang dipandang perlu untuk disampaikan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mewakili seluruh Anggota DPR menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Ferry Kase, S.H. dari Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan NTT II yang baru saja diambil sumpahnya untuk menjadi Anggota DPR. Semoga kehadiran Saudara Ferry Kase dapat turut memperkuat pelaksanaan tugas-tugas DPR.

Kepada Saudara Ferry Kase, dimohon untuk berdiri.

[Saudara Ferry Kase Berdiri]

Kami persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terlebih dahulu Dewan menyampaikan keprihatinan yang mendalam, atas terjadinya berbagai musibah bencana yang menimpa saudara kita di berbagai belahan negeri, di penghujung tahun 2014. Seperti kecelakaan pesawat, tanah longsor, letusan gunung, banjir, dan kebakaran.

Kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501 sudah tentu menjadi keprihatinan dan duka kita bersama. DPR menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah pesawat Air Asia tersebut. Semoga keluarga serta kerabat korban yang ditinggalkan, diberikan kesabaran dan ketabahan. Begitu juga atas musibah tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara, dimana Pimpinan DPR telah melakukan kunjungan langsung yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra ke lokasi bencana. Di sisi lain, gunung berapi di beberapa daerah di Indonesia masih memperlihatkan aktivitasnya, seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Atas berbagai peristiwa bencana yang terjadi, DPR memandang bahwa sistem mitigasi bencana kita masih sangat lemah untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber potensi bencana alam. Untuk itu, Pemerintah

perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh dan komprehensif atas sistem mitigasi dan penanganan bencana yang terus mengancam kehidupan masyarakat.

Terkait kecelakaan Pesawat Air Asia QZ 8501, DPR menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah dan Tim SAR Gabungan di bawah koordinasi Basarnas, dan juga kepada relawan serta masyarakat nelayan, atas upayanya yang tak kenal lelah dalam pencarian pesawat dan pengevakuasian para korban. DPR juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada negara-negara sahabat yang ikut membantu.

Selanjutnya, Pimpinan DPR berpandangan bahwa perlu dilakukan pembenahan berbagai aspek melalui regulasi dan pengawasan yang ketat, baik oleh pemerintah maupun oleh operator sendiri, untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat, dalam menggunakan transportasi udara yang mengalami peningkatan rata-rata sekitar 15 persen per tahun.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masyarakat Indonesia sedang menunggu apa yang akan dilakukan DPR pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015 ini. Maka dari itu, Pimpinan DPR mengajak seluruh Anggota DPR pada Masa Sidang II ini, untuk

secara sungguh-sungguh menjalankan tugas konstitusional yang diamanatkan kepada kita, dalam kerangka *checks and balances*. Kita satukan hati dan rasa membangun kolektivisme kerja untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas kerja-kerja Pemerintah. Karena sesungguhnya tidak ada pemerintahan yang baik tanpa adanya lembaga pengawas yang kuat sebagai representasi daulat kuasa rakyat.

Untuk itu, di bidang legislasi, DPR pada Masa Sidang II ini akan segera menyusun Program Legislasi Nasional atau Prolegnas yang merupakan daftar Rancangan Undang-Undang atau RUU sebagai acuan pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama lima tahun ke depan. Pimpinan DPR mengharapkan baik DPR maupun Pemerintah, dapat mengajukan daftar RUU yang sangat mendesak untuk dibentuk dan dibahas serta mempunyai nilai kepentingan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk diperhatikan bahwa Prolegnas ini harus realistis serta sesuai dengan arah hukum yang hendak diwujudkan, sehingga dapat diselesaikan bersama oleh DPR dan Pemerintah secara tepat waktu.

Berdasarkan realisasi pembentukan undang-undang yang telah dilaksanakan oleh DPR bersama

dengan Pemerintah pada periode sebelumnya, jumlah RUU yang dapat diselesaikan dalam satu tahun adalah berkisar antara 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) RUU. Dengan demikian, untuk menyusun jumlah RUU yang realistis masuk dalam Prolegnas 2015–2019 adalah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) RUU. Hal ini perlu menjadi pertimbangan DPR dan Pemerintah dalam menetapkan Prolegnas.

Selain itu, masih dalam konteks fungsi legislasi, DPR juga akan segera menyusun daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Sehingga mulai Masa Sidang ini, Komisi-Komisi dapat segera menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan RUU sesuai dengan prioritas masing-masing Komisi. Berdasarkan Undang-Undang MD3 dan ketentuan Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 184 Peraturan DPR mengenai Tata Tertib disebutkan juga bahwa setiap Anggota memiliki hak mengajukan usul RUU. Untuk itu setiap Anggota diharapkan dapat mengajukan usul RUU sesuai dengan mekanisme pengajuan RUU.

Di samping itu, DPR juga akan menggiatkan program sosialisasi undang-undang yang telah disahkan agar masyarakat memahami lebih awal setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Terkait pembahasan RUU, di Masa Sidang II ini tugas pembahasan RUU yang penting untuk segera dilakukan adalah pembahasan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembahasan kedua Perppu tersebut penting untuk dilakukan, karena pada tahun 2015 kita harus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan baik melalui aturan hukum yang pasti.

Di samping pembahasan terhadap Perppu yang harus diselesaikan pada Masa Sidang II ini, akan diprioritaskan juga pembahasan terhadap RUU tentang KUHP dan RUU tentang KUHAP untuk segera diselesaikan dalam periode DPR RI saat ini. Dengan demikian pada Masa Sidang II ini DPR menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) RUU, yaitu 2 (dua) Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang, dan 1 (satu) Penetapan APBN-P Tahun Anggaran 2015.

Oleh karena itu, DPR meminta Pemerintah untuk segera menyampaikan RAPBN-P Tahun Anggaran 2015. Pengajuan RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 tidak dapat

dilepaskan dari keberadaan APBN Tahun Anggaran 2015 yang disusun pada masa peralihan dari pemerintahan terdahulu kepada pemerintahan baru yang hanya bersifat *baseline*, dengan maksud memberikan ruang bagi pemerintahan baru untuk dapat melakukan perubahan dengan memasukkan program-program prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2015.

Terkait kebijakan itu, maka Komisi-komisi perlu mengkritisi RAPBN-P terutama yang terkait dengan kebijakan peningkatan penerimaan pajak, belanja modal untuk infrastruktur, dan pengurangan defisit anggaran. Pimpinan DPR berharap Badan Anggaran dan Komisi-Komisi terkait segera melakukan pembahasan paling lama satu bulan dalam masa sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Tata Tertib DPR.

Sebagaimana diketahui bahwa pada akhir-akhir ini kecenderungan harga minyak mentah internasional mengalami penurunan yang drastis. Bahkan, sampai di bawah level angka 50 US Dolar per barel. Sementara itu asumsi harga minyak mentah internasional dalam APBN 2015 dipatok sebesar 105 US Dolar per barel. Kondisi ini akan berpengaruh kepada menurunnya penerimaan yang berasal dari migas. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengupayakan optimalisasi dari pendapatan, terutama

dari sektor pajak yang memang pada akhir-akhir ini kecenderungannya tidak mencapai target.

Di sisi lain, kita mengetahui bahwa visi misi Presiden yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur perlu menjadi pokok bahasan yang dikritisi oleh masing-masing Komisi. Terutama yang berkaitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan pertanian, dalam rangka untuk mendukung konektivitas antar-wilayah, serta untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan pengembangan pariwisata.

Di bidang pengawasan, pada Masa Sidang II ini, DPR akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi-komisi DPR RI dengan mitra kerjanya, maupun Rapat Dengar Pendapat Umum untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

Pimpinan DPR mendapat banyak evaluasi dari publik bahwa dalam Masa Sidang Pertama yang lalu, peran dan kontribusi DPR dalam melaksanakan *checks and balances* masih sangat minim. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat banyak, belum dapat dikritisi oleh DPR secara kelembagaan, diantaranya

perubahan nomenklatur kabinet, penerbitan Kartu Pintar, Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, kebijakan menaikkan harga BBM Bersubsidi, perubahan sistem penetapan harga BBM Bersubsidi, kenaikan harga elpiji 12 kilogram, dan berbagai kebijakan lain yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Khusus terkait dengan pengalihan subsidi BBM, DPR melalui Komisi-Komisi dan Anggotanya, harus meningkatkan daya kritis dan kontrol kepada Pemerintah agar janji Pemerintah yang mengalihkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat produktif dan untuk kepentingan peningkatan standar kehidupan masyarakat kecil, benar-benar terlaksana secara konsisten.

Terkait pengangkatan pejabat publik, pada Masa Sidang I lalu, DPR melalui Komisi III telah melakukan *fit and proper test* terhadap calon Pimpinan KPK untuk mengisi salah satu jabatan Pimpinan KPK, dan akan ditindaklanjuti dalam Masa Sidang II ini.

Masih terkait dengan fungsi pengawasan, DPR juga akan segera memberikan pertimbangan terhadap penempatan 12 (dua belas) calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Sementara itu dalam rangka melaksanakan peran diplomasi antar-parlemen, dapat kami sampaikan bahwa Delegasi DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, saat ini sedang menghadiri Sidang Tahunan *Asia Pacific Parliamentary Forum* atau APPF ke-23 di Quito, Ekuador. Delegasi DPR juga direncanakan akan menghadiri Konferensi ke-10 Uni Parlemen –Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau PUIC yang diselenggarakan di Istanbul, Turki dalam waktu dekat, dan Sidang Tahunan Konferensi Parlemen tentang WTO yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, bulan Februari 2015. Di samping itu, DPR akan menerima kunjungan delegasi parlemen Madagaskar dan delegasi Majelis Syuro Arab Saudi yang akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Januari ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, DPR dituntut untuk melakukan reformasi dan penguatan kelembagaan. Maka DPR akan segera menyusun Rencana Strategis atau Renstra DPR RI 2015–2019. Dokumen perencanaan strategis ini akan menjadi

pedoman bagi DPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Renstra akan memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan DPR selama lima tahun. Di samping itu, Renstra juga memberikan gambaran perencanaan kegiatan DPR jangka pendek dan jangka menengah yang didukung dengan anggaran untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Renstra akan memuat agenda strategis yang perlu dilakukan DPR guna mewujudkan reformasi DPR RI. Untuk percepatan sesuai tuntutan Undang-Undang MD3 tersebut, maka Pimpinan DPR akan segera membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR yang akan bertugas melakukan percepatan sistem reformasi menuju parlemen modern.

Selain Renstra, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, DPR akan menyusun Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Tahun 2016 untuk menjadi acuan penyusunan anggaran DPR tahun tersebut. Dan DPR juga akan melanjutkan Pembahasan Evaluasi dan Penyempurnaan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait perubahan Undang-Undang MD3 maka juga harus segera dilakukan perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Amanat perubahan MD3 juga menuntut DPR segera melakukan penambahan satu orang pimpinan di masing-masing Alat Kelengkapan DPR. Dua hal tersebut akan segera diselesaikan di awal Masa Sidang II ini. Di samping itu, perlu kami tegaskan kembali, bahwa Undang-Undang MD3 melahirkan serangkaian tradisi baru dalam tata cara persidangan di DPR, di antaranya kewajiban Anggota untuk menyebut nama dan daerah pemilihan dalam setiap mengawali pembicaraan dan pemberian hak kepada Anggota untuk menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihan dalam awal Sidang Paripurna.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian, antara lain, pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan oleh DPR pada Masa Sidang II ini dan berbagai hal yang menjadi sorotan DPR, dalam kerangka pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, serta peran diplomasi antar-parlemen dan agenda penguatan kelembagaan DPR.

Dan akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Masa Sidang II DPR RI, Tahun Sidang 2014–2015 yang akan dimulai sejak hari ini, Senin, 12 Januari 2015 akan berlangsung sampai dengan 18 Februari 2015. Dengan demikian selesai sudah Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2014–2015. Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan SELAMAT BEKERJA, semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita sekalian.

Amin.

Terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, 12 Januari 2015

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Drs. H. SETYA NOVANTO, Ak.